MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

SURAT TUGAS

Nomor : 311 /DJMT/KP7.1/XI/2023

Menimbang : Bahwa untuk mewujudkan kualitas mutu manajemen dan pelayanan peradilan serta meningkatkan performa kinerja organisasi dan aparatur peradilan yang profesional pada pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara perlu dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap manajemen dan layanan peradilan.

Dasar : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 132/DjMT/KEP/HK.00.6/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap Manajemen dan Layanan Peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2023.

Memberi Tugas

Kepada :
1. Dr. H. Hari Sugiharto, S.H. M.H./ 196907141991031006, Pembina Utama (IV/e), Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Dr. Nasrifal, S.H., M.H./ 197607272003121001, Pembina (IV/a), Kasubdit Pengembangan Tenaga Teknis Ditbinganismintun;
3. Agus Abdur Rahman, S.H., M.H./ 198208022009041002, Penata Tingkat I (III/d), Hakim Yustisial;
4. Intan Sari Widya Ningrum, S.H.,M.H./ 199008282012122003, Penata (III/c), Kasi Statistik dan Dokumentasi Ditbinganismintun.

Untuk : Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Manajemen Layanan Peradilan bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 22 sd. 24 November 2023;

Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2023

Plt. Direktur Jenderal
Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara,

Bambang Myanto